

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi mengenai peternakan ayam di tengah pemukiman Desa Limbur Tembesi, maka didapatkan kesimpulan berikut ini.

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sebagai dampak dari adanya peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi yakni ketentuan di dalam UUPPLH dan Permentan yang melarang adanya peternakan berada di tengah pemukiman masyarakat dan wajib mempunyai perizinan, kemudian masyarakat mempunyai hak atas lingkungan hidup yang sehat serta berhak untuk melakukan pengaduan jika merasa dirugikan oleh peternakan ayam. Selain itu, aturan hukum juga akan memberikan sanksi administratif maupun pidana yang diberikan kepada peternakan yang sudah melakukan pelanggaran. Dampak dari kegiatan peternakan tersebut lebih memberikan dampak positif kepada masyarakat yakni dari segi ekonomi dan sosial, meskipun juga ada dampak negatif yakni dari bau busuk dan lalat yang ditimbulkan dari peternakan ayam. Meskipun demikian, sanksi administratif di Desa Limbur Tembesi tidak berjalan dengan baik sebab peternakan masih berdasarkan pada aturan adat dan ajaran leluhur setempat. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari dampak peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi secara normative belum berjalan seutuhnya. Namun, perlindungan hukum dengan menggunakan

kebiasaan masyarakat setempat, yakni perjanjian antara peternak dengan masyarakat sekitar.

2. Kendala utama dalam perlindungan hukum dikarenakan masyarakat tidak mengetahui secara keseluruhan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan, hanya mengetahui beberapa ketentuan hukum saja. Di lain sisi, beberapa peternakan juga tidak mengetahui aturan normatif. Solusinya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sarolangun melakukan sosialisasi mengenai pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta berbagai macam peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Kemudian agar Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun juga melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pentingnya perizinan bagi peternakan di Desa Limbur Tembesi, baik peternakan skala kecil maupun skala mikro, serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peternakan, utamanya peternakan ayam.

B. Saran

Berdasarkan fakta mengenai peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi, maka saran yang diberikan penulis terhadap DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), pemerintah, pemilik peternakan, masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, berikut ini.

1. Kepada pemerintah daerah, sebaiknya lebih memperhatikan sarana dan prasarana di Desa Limbur Tembesi, seperti mengadakan dan/ atau perbaikan jalan kampung. Jalan kampung sangat dibutuhkan masyarakat sebab mempengaruhi roda perekonomian, jalan kampung yang tersedia dengan kondisi yang memadai sangat menopang perekonomian masyarakat dalam melakukan mobilisasi dari tempat tinggal mereka ke pasar dan/ atau ke arah kota. Semakin tersedia dan bagus kondisi jalan kampung maka semakin mempercepat distribusi dan meningkatkan perekonomian;
2. Kepada pemilik peternakan, maka harus konsisten menjaga kebersihan kandang, sebab sangat berpengaruh sekali pada kesehatan warga masyarakat, terutama bau busuk yang ditimbulkan dari feses ayam, larva lalat dan lalat;
3. Kepada masyarakat untuk senantiasa mengingatkan peternak dalam menjaga kebersihan kandang, serta diusahakan jangan sampai lagi ada penambahan peternakan di tengah pemukiman masyarakat sebab sebetulnya meskipun hanya “hak” atas lingkungan hidup, namun seyogianya diartikan bahwa “hak” adalah sesuatu yang perlu dinikmati oleh penerimanya. Kemudian, hendaknya masyarakat melakukan pengaduan jika ada indikasi

dari peternak yang tidak menjaga kebersihan lingkungan sehingga membuat masyarakat merasa terganggu;

4. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat di Desa Limbur Tembesi, mereka berhak atas lingkungan hidup yang sehat. bahwa Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai adanya pembinaan tersebut, kemudian juga pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Kemudian juga senantiasa mengingatkan warga masyarakat untuk segera melakukan pengaduan jika merasa dirugikan oleh peternakan ayam; dan
5. Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi adalah hendaknya senantiasa mengingatkan masyarakat bahwa tidak boleh mendirikan peternakan di tengah pemukiman masyarakat, hal itu dapat mengganggu HAM dari masyarakat sekitar peternakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Edhy Sudjarwo, dkk., 2019, *Manajemen Produksi Ternak Unggas*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Edy Ustomo, 2016, *99% Gagal Beternak Ayam Broiler*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta Pusat.
- Eryadi, 2007, *Intisari Pengetahuan Sosial Lengkap (IPSL) SMP*, Kawan Pustaka, Jakarta Selatan.
- Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, 2019, *Optimalisasi Potensi Desa*, Grasindo, Jakarta Pusat.
- Isworo Tjokrosaptono R., dan Kelompok Tani Ternak Setia, 2013, *Solusi Bisnis & Beternak Ayam Kampung Pedaging*, AgroMedia Pustaka, Jakarta.
- Kliwon Sujionohadi dan Ade Iwan Setiawan, 2013, *Ayam Kampung Petelur*, Niaga Swadaya, Jakarta.
- Koenadi Hardjasoemantri, 2019 (Edisi VIII), *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Komariah, 2019, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Roni Fadilah, 2013, *Super Lengkap Beternak Ayam Broiler*, AgroMedia, Jakarta Selatan.
- Sabartiyah, 2019, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, Alprin, Semarang.
- Sri Waluyo dan Mahmud Efendi, 2016, *Beternak Ayam Broiler Tanpa Bau Tanpa Vaksin*, AgroMedia Pustaka, Jakarta.
- Suharyono, 2022, *Hukum Pertanahan di Indonesia “Progresivitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia”*, Intelgensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), Malang.
- Veronika Nugraheni Sri Lestari, dkk., 2022, *Padamu Negeri Kami Mengabdikan*, Unitomo Press, Surabaya.

William J. Seta, 2017, *ATLAS Lengkap Pelajar Indonesia & Dunia*, WahyuMedia, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

Bayu Sulisty Pamungkas Sunoto, 2012, *Hukum dan Peternakan Ayam (Studi tentang Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dwi Saipul Chandra, 2020, *Pembangunan Pasca Pemekaran Desa Menjadi Kelurahan (Studi analisis Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batihin VIII Kabupaten Sarolangun)*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Galuh Noalina Puspita Langit, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Peternakan Ayam yang Berada di Pemukiman Penduduk di Kabupaten Deli Serdang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Gde Oka Dharmawan Carma, 2018, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Karebet Sawung Nagari, 2020, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Peternakan Ayam di Kecamatan Ngemplak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mohammad Faiz Falatehan, 2018, *Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Cipta dalam Aktivitas Pengocveran Lagu di Media Sosial Youtube*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Rikha Yullina Siagian, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Sahlul Umur Situmeang, 2016, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

C. Jurnal Hukum

- Ana Tasia, 2014, "Ternak di Kabupaten Sarolangun Peran Dinas Pertanian dalam Mengawasi Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penetiban Pemeliharaan di Kabupaten Sarolangun", *Jurnal Manajemen dan Terapan*, Vol. 3, Nomor 2 Tahun 2014, Universitas Jambi.
- Badrun, 2021, "Ternak Ayam RAS Petelur di tengah Pemukiman Masyarakat dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kampung Setia Negara Baradatu, Way Kanan)", *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2021, STAI Al-ma'rif Way Kanan.
- Fitri Yanni Dewi Siregar, 2020, "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, Nomor 2 Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Lalu Mulyadi, Aladin Eko Purkuncoro, dan Taufik Hidayat, 2020, "Penerapan Mesin Pakan Ternak untuk Meningkatkan Kualitas Pakan Ternak Kambing Etawa di 'Konco Tani Makmur' Desa Bolosingo Kabupaten Pacitan", *Abdimas Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2020, Institut Teknologi Nasional Malang.
- Mery Christiana Simanjuntak, 2018, "Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi", *Jurnal Fapertanak*, Vol. 3, Nomor 1 Agustus 2018, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire.
- Sinta Hariyati, 2015, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda", *Journal Ilmu Pemerintahan, eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, Nomor 2 Tahun 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Mulawarman.
- Sunaryo Hadi Warsito, Oky Setyo Widodo dan Shelly Wulandari, 2018, "Pengetahuan Manajemen Peternakan dan Pemanfaatan Hasil Ternak sebagai Sumber Gizi Masyarakat di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Layanan Masyarakat Universitas Airlangga*, Vol. 02 Nomor 02 Tahun 2018, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Theresia Ngutra, 2016, "Hukum dan Sumber-sumber Hukum", *Jurnal Online Universitas Negeri Makassar*, Vol. 11, Nomor 2 Oktober 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Makassar.

D. Peraturan Hukum

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Pemeliharaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam RAS yang Baik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 437. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.230/12/2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam RAS. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1869. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelurahan Sungai Benteng, Kelurahan Pauh dan Kelurahan Limbur Tembesi, Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 12. Sekretariat Daerah, Jambi.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jambi, Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6. Sekretariat Daerah, Jambi.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033, Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10. Sekretariat Daerah, Jambi.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6. Sekretariat Daerah, Jambi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak, Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 23. Sekretariat Daerah, Sarolangun.
- Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 258 K/Pid.Sus/2012 hari Rabu tanggal 29 Januari 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Cms. hari Jumat tanggal 14 Desember 2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 3106 K/Pdt/2019 hari Senin tanggal 2 Desember 2019.

E. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring (Pemutakhiran Terakhir April 2022), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 20 September 2022.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Pencemaran Lingkungan dan Solusinya, https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Pencemaran_Lingkungan_dan_Solusinya.pdf, diakses 28 September 2022.

Dinas Lingkungan Kabupaten Sarolangun, <https://sarolangunkab.go.id/utama/statis-43-dinas-lingkungan-hidup.html#>, diakses 5 Oktober 2022.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun, <https://dpmpstp.sarolangunkab.go.id>, diakses 5 Oktober 2022.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, <https://sarolangunkab.go.id/utama/statis-6-visi-dan-misi.html#>, diakses 5 Oktober 2022.

Pengertian Hak Menurut Ahli, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/08/01000071/pengertian-hak-menurut-ahli?page=all>, diakses 27 September 2022.

Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>, diakses 16 Oktober 2022.

Senta BR Tarigan, Kajian Kualitas Pakan Ayam Petelur Fase Layer di Peternakan Tunas Mulya Farm Desa Wates Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, http://eprints.undip.ac.id/55990/3/Bab_II.pdf, diakses 25 September 2022.

Tim Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh-->

[dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2](#), diakses 28 September 2022.

Zahro, Y. L.,
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%20202%20bab%20.pdf?sequence=12&isAllowed=y>, diakses 20 September 2022.

